



buletin

Parlementaria

Nomor 957/II/V/2017 • Mei 2017

**Kemajuan Teknologi
Informasi Harus Dijawab
dengan Mempertahankan
Jati Diri Bangsa**

**Komisi II DPR RI Apresiasi
Sumsel dapat Predikat
Zona Hijau Ombudsman**



**Timwas TKI
Usulkan Perpanjangan
Waktu Pembahasan
RUU PPTKILN**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

Timwas TKI Usulkan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU PPTKILN

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan Revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) hingga satu masa sidang ke depan.

“Seluruh masalah terkait Tenaga Kerja Indonesia telah diantisipasi di dalam RUU PPTKILN. Namun, Timwas minta perpanjangan waktu untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah,” ungkap Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/04).

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil observasi di lapangan, Timwas TKI telah memetakan permasalahan TKI menjadi 3 bagian, yaitu pada masa pra penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Beberapa diantaranya ialah minimnya pengawasan terhadap calo, koordinasi antar-instansi yang kurang baik, serta buruknya sistem pendataan CTKI maupun purna.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI yang

membidangi Ketenagakerjaan Dede Yusuf mengatakan ada delapan isu krusial dalam revisi perubahan UU PPTKILN. Ia menjelaskan, tujuh isu diantaranya telah disepakati bersama pemerintah. Namun, terdapat satu hal yang masih menjadi *deadlock* antara Pemerintah dan DPR RI.

DPR RI, sambungnya, menginginkan adanya lembaga independen yang khusus menangani buruh migran dari hulu hingga ke hilir. Terkait hal itu, Pemerintah meminta badan ini bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sementara DPR menginginkan nantinya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Tidak pakai "melalui", karena sebagaimana yang kita ketahui, selama ini justru permasalahan itu sebab ada dualisme

kelembagaan yang menangani TKI, yaitu Kemenaker dan BNP2TKI. Nah, inilah yang akhirnya sering bertubrukan dua kepentingan," jelas politisi dari F-Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia menuturkan fungsi regulator akan diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi fungsi operator atau pelaksana akan dimandatkan kepada badan yang akan dibentuk.

"Pada prinsipnya, isu-isu krusial ini sudah kami diskusikan dengan beberapa LSM, dan rata-rata mereka sudah sepakat isu krusial ini kita dahulukan. Nah, jika isu krusial ini sudah selesai maka pembahasan 400 DIM ini tidak menjadi suatu masalah. 7 isu krusial yang sudah disepakati bisa segera diformulasikan sehingga masuk masa sidang berikutnya, kami tinggal mengejar yang belum disepakati saja," tandas Dede Yusuf. ■

(am/so), Foto : Ojje/hr



Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI Fahri Hamzah, bersama Anggota Timwas TKI Rieke Diah Pitaloka, dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf



Ketua DPR RI Berharap Masyarakat Ambil Hikmah Perjuangan Kartini

Dalam memperingati Hari Kartini Ketua DPR RI Setya Novanto berharap, seluruh masyarakat mengambil hikmah dari Perjuangan Kartini. Harkat dan Martabat kaum perempuan harus terus diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan kemanusiaan. Mereka memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki untuk dilindungi sebagai warga negara dari segala potensi ancaman dan penindasan.

“ Dalam keterangan persnya Jumat (21/4) di Jakarta, Pimpinan Dewan dari FPG ini menyatakan, Kartini merupakan inspirasi kebangkitan di tengah kungkungan tradisi paternalistik yang begitu kuat di zaman penjajahan Belanda. Ia yang lahir pada 21 April 1879, berasal dari keluarga priyayi yang terhormat, merasakan kegelisahan hidup yang tidak mengakomodasi cita-cita dan harapannya sebagai seorang wanita dan manusia yang layak mendapatkan pendidikan dan kebebasan bersuara dan berpendapat sebagaimana lazimnya kaum lelaki.

Menurut Novanto, perjuangan Kartini melawan kungkungan dengan berbagai cara, hingga menerbitkan tulisan-tulisan yang terangkum dalam sebuah judul inspiratif: Habis Gelap, Terbitlah Terang. " Kita tentu memahami judul tersebut sebagai cita-cita dan harapan tentang eksistensi kaum hawa di masa depan," ungkap dia.

Saat ini, ujar Novanto, inspirasi Kartini telah menjadi gagasan yang besar dan menempati tempat penting dalam setiap program dan kebijakan. Kehadiran wanita dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mampu memberi warna dan teladan tentang bagaimana sesungguhnya menjalani kehidupan di berbagai bidang.

Lebihlanjut dikemukakan, kaum Perempuan telah menjadi bagian dari kebijakan. Suara mereka menjadi penting didengar dan diaktualisasikan. Kehidupan sosial dan kemasyarakatan akan menjadi terasa lebih harmonis, teduh dan sejuk dengan sentuhan ide dan pemikiran kaum hawa.

"Kita begitu bangga, bahwa sejarah telah mewariskan kisah heroik tentang Kartini Muda yang enerjik. Meski di usia yang cukup belia, ia mampu menginspirasi generasi demi generasi. Wanita bukanlah kaum yang lemah secara ide, gagasan dan pemikiran. Mereka memiliki rasionalitas sebagaimana kaum lelaki diberi hal yang sama sebagai anugerah," demikian Setya Novanto. ■



Ketua DPR RI, Setya Novanto

(mp). Foto: Jaka/hr

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**
Bagus Mudjiharjanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Rizka Arinindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,
Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah
- ADMINISTRASI FOTO**
Hasri Mentari
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN
Pimpinan Penerbitan
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

Penanggung Jawab Produksi
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

Staf Produksi
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

Distribusi dan Sirkulasi
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

Koordinator
Mujiono

Staf Distribusi dan Sirkulasi
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Kemajuan Teknologi Informasi Harus Dijawab dengan Mempertahankan Jati Diri Bangsa

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan Indonesia Asia Institut dan Rektor Perbanas, dalam kunjungan ini dibicarakan soal perkembangan metodologi pendidikan dengan memperhatikan kemajuan teknologi informasi. Dia juga menyampaikan, para tenaga pendidik baik guru atau dosen harus bisa menjawab tantangan zaman ini dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia.

Saat dialog disampaikan juga, sudah saatnya memikirkan revisi terhadap Undang-undang Sisdiknas, karena sudah terlalu lama dari 2005. Padahal di sisi lain, kemajuan teknologi berkembang dengan cepat, ini juga merupakan salah satu masukan yang penting.

"Masukannya harus menyesuaikan, karena siswa sekarang beda dengan dulu, kalau dulu siswa menunggu guru diajarkan, semacam transfer *knowledge* dari guru ke siswa. Kalau sekarang siswa bisa belajar sendiri, dengan begitu banyaknya sumber informasi, tinggal bagaimana memanajemeni," papar Fadli di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/04).

Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi guru dan dosen menghadapi kemajuan zaman, peran tenaga pendidik mulai bergeser. Hampir semua orang punya gadget, lewat media *handphone* bisa jadi sumber informasi, sumber ilmu dan pengetahuan yang efektif. Ada pergeseran yang harus diadaptasi oleh guru dan dosen dalam rangka teknik mengajar, teknik berkomunikasi dengan siswa.

"Termasuk itu tadi kita perlu memikirkan revisi terhadap undang-undang guru dan dosen. Karena peran guru dan dosen mulai bergeser, dengan meningkatnya teknologi informasi," ungkap Fadli.

Namun keteladanan dan pembentukan karakter sulit didapatkan dari kemajuan teknologi informasi. Oleh sebab itu guru berperan penting dalam pembentukan karakter yang dimulai dari level yang paling dasar. Menurut Fadli, di level sekolah dasar pembentukan karakter menjadi sangat penting. "Jadi SD, TK, menjadi masa-masa penting dalam pembentukan karakter siswa," ujarnya.

Sedangkan untuk mempertahankan identitas dan jati diri bangsa, Fadli menyarankan, lembaga pendidikan perlu memberikan pelajaran tentang sejarah dan budaya bangsa. Dia menegaskan pengetahuan siswa tentang sejarah dan budaya akan membentuk karakter dan jati diri generasi bangsa.

"Karena ini yang tidak mungkin bisa didapatkan dari tempat-tempat lain. Itu sangat *local specific*, ini sangat penting dikedepankan di masa-masa pembentukan awal siswa, terutama di sekolah dasar," jelas Fadli. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Buruh Bagian Dari Pemain Politik

Anggota Komisi IX DPR RI F-PPP Irgan Chairul Mahfiz menegaskan jika buruh merupakan bagian dari pemain politik. Hal itu sebagai sesuatu yang wajar karena dilindungi oleh Undang-Undang. Bahwa semua komponen masyarakat sah-sah saja berpolitik, apalagi kondisi politiknya sudah terbuka dan bebas. Termasuk bagi para pekerja, buruh dan sebagainya.

“Justru menjadi tidak tepat jika buruh tidak terlibat dalam panggung politik. Sebab, kebijakan-kebijakan tentang buruh dari pemerintah dan DPR RI juga dilahirkan dari panggung politik itu sendiri. Jadi, kalau buruh buta politik nanti malah bisa dipertontonkan oleh politik itu sendiri. Khususnya terkait dengan kesejahteraan yang juga diputuskan secara politik,” kata Irgan dalam forum legislasi "Menakar UU Ketenagakerjaan, Masihkah Buruh Jadi Alat Politik" bersama Dewi Asmara (Anggota Komisi IX DPR RI-F-PG) dan Sonny Pudji Sasono, tokoh buruh Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/04).

Karena itu kata Irgan, tidak ada pembatasan buruh untuk melakukan kegiatan politik. Dimana UUD 1945 memberi peluang untuk berpolitik. Juga untuk buruh dan pekerja. "Era reformasi menjadi pintu gerbang terjadinya penyatuan suara buruh yang berujung pada pembentukan partai politik. Sayangnya, partai-partai politik berbasis buruh tidak mendapat dukungan seperti yang diharapkan," kata Irgan.

Dengan demikian menurut Irgan, era reformasi terjadi peluang bagi gerakan buruh dalam politik nasional. Hanya saja



Suasana forum legislasi "Menakar UU Ketenagakerjaan, Masihkah Buruh Jadi Alat Politik"

kesolidan buruh tidak begitu berdampak. "Ketika pemilu 1999 awal reformasi memang ada keinginan buruh berkonsolidasi dengan membentuk partai. Tapi, hanya mendapat 0,5% suara nasional. Itu artinya partai buruh tidak diminati masyarakat termasuk buruh sendiri. Namun, kalau gerakan buruhnya saya apresiasi," tambah Irgan.

Menyinggung Balai Latihan Kerja (BLK) lanjut Irgan, anggaran untuk ketenagakerjaan hanya Rp 4 triliun, padahal terdapat 6 juta tenaga kerja di luar negeri, yang setiap bulannya memberi masukan pada negara minimal Rp 1 juta. "Jadi, anggaran Rp 4 triliun tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pemasukan TKI dari luar negeri. Namun, apapun alasannya harus ada penguatan (empowering) TKI dalam negeri. Sebab, kalau tidak, akan kalah dengan tenaga kerja asing," ungkapnya.

Untuk itu penanganan BLK itu harus serius mengingat tenaga kerja asing terus membanjiri Indonesia. Bahkan, pelayan-pelayan hotel sudah dari luar negeri, tukang ngaduk semen di PT Semen Indonesia, Banten, di Jawa Tengah sebagian sudah berasal dari luar negeri. "Fakta inilah yang harus menjadi perhatian bersama agar TKI dalam negeri tidak kalah dengan asing," pungkasnya.

Dewi Asmara menyatakan yang sama jika bebas bagi buruh untuk berpartisipasi dalam politik praktis. "Golkar pun siap menjadi wadah

aspirasi asal sesuai dengan cita-cita Golkar. Jadi, banyak hal yang harus dibicarakan terkait buruh dan BLK sendiri," katanya.

Menurut Dewi, BLK ini sama seperti jalan. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga tidak semua BLK menjadi kewajiban pusat. "Itu konsekuensi otonomi daerah. Masalahnya, mau tidak Mendagri mengembalikan masalah BLK itu kepada Kemenaker?" katanya mempertanyakan.

Selain itu Dewi mengakui jika mayoritas TKI masih berpendidikan rendah. Dari 150 juta TKI misalnya sebanyak 60% berpendidikan SD, dan 20% baru SMP. "Jadi, apakah serikat pekerja itu bersatu atau tidak, tetap tidak ada larangan untuk berpolitik. Hal itu tergantung kepada kepiawaian serikat buruh dan pekerja itu sendiri," pungkasnya.

Sementara itu, Sonny menilai jika masalah

BLK itu tak akan habis-habisnya karena BLK sendiri tak pernah *update* soal buruh. Sehingga melakukan *training* tenaga kerja sendiri meski tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Padahal, investasi sangat besar saat ini dengan menyerap tenaga kerja sampai 1,5 juta orang. "Tapi, kenapa investasi yang besar justru masih banyak pengangguran," ujarnya mempertanyakan.

Persoalannya kata Sonny, ada di pemerintah sendiri dimana setiap investasi sudah satu paket dengan tenaga kerjanya. Konsekuensinya maka TKI kita hanya menjadi penonton. "Banyak investasi yang masuk, tapi masih banyak pula pengangguran. Itulah yang perlu solusi agar kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri," ungkapnya.

Sonny juga mengakui jika serikat pekerja dan buruh juga tergantung pemilik modal. Bisa membentuk serikat buruh dan pekerja juga tergantung pemodal. Untuk itu ke depan menurut Sonny, bagaimana Kemenaker RI itu tidak dijabat oleh elit parpol. Mengingat tak semua masyarakat bisa mengakses BLK, kecuali mereka yang menjadi bagian dari parpol.

Sejauh itu Sonny bersyukur, karena buruh dan pekerja saat ini bisa gerak jalan, mancing, dan wisata lainnya yang difasilitasi pemerintah melalui hari buruh atau 'May Day' dan lain-lain. "Buruh pun sulit disatukan karena masing-masing sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang berbeda-beda. Sayangnya, organisasi buruh justru senang mengurus PHK (pemutusan hubungan kerja) karena di PHK ada *fee*-nya. Bukan malah memperjuangkan bagaimana buruh bisa bekerja kembali. "Padahal dibentuknya serikat buruh itu agar tak ada PHK. Tapi, karena *success fee*-nya maka banyak yang mengurus PHK. Jadi, serikat buruh pun akan berjalan sesuai politik sendiri," pungkasnya. ■

(sej), Foto:rumi/hr



MKD Bertugas Jaga Harkat dan Martabat DPR RI

Anggota MKD, Muhammad Syafii

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk untuk menjaga harkat, martabat dan wibawa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), baik sebagai orang-perseorangan maupun sebagai kelembagaan. Adapun yang diatur dalam MKD adalah soal etika, perlu dipahami oleh masyarakat, pelanggaran etika itu belum tentu pelanggaran hukum, sementara pelanggaran hukum itu pasti pelanggaran etika. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota MKD Muhammad Syafii setelah menjalin koordinasi dengan jajaran Polda Kalimantan Timur.

Dia juga menegaskan, MKD memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan aturan penegakan hukum. Hal lain yang ditandaskannya adalah, masalah yang masih dalam dugaan pelanggaran hukum pada Anggota Dewan sebaiknya tidak perlu diumbar di media, karena jika dugaan tidak terbukti nama baik anggota yang sudah tercemar sulit dipulihkan.

"Kita inginkan bahwa proses hukum terhadap Anggota DPR itu harus benar-benar sesuai SOP, jangan kemudian masih dalam dugaan melakukan pelanggaran sudah 'difestifalisasi' di media. Nah itu kan menghilangkan marwah, harkat dan martabat Anggota DPR. Karena itu, kita bersosialisasi

kepada seluruh aparat penegak hukum tanah air, apabila ada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Anggota DPR RI itu langsung dilaporkan ke MKD. Kami akan membantu agar proses itu berjalan sesuai aturan yang ada," jelas Syafii di Kantor Polda Kaltim, Kamis (20/04).

Meski tidak dipublikasikan, namun dia menjamin proses hukum bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP. Hal ini semata-mata demi menjaga nama baik Anggota Dewan yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini MKD bertugas menjaga harkat dan martabat Anggota Dewan.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini memaparkan, tugas MKD ada dua, pertama

adalah pencegahan, yang kedua penindakan. Dia melanjutkan, kalau penindakan maka sudah masuk dalam proses persidangan dalam MKD, sementara dalam pencegahan dilakukan sosialisasi. "Apalagi yang bisa MKD lakukan kecuali mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di MKD kemudian memberikan himbauan-himbauan agar Anggota DPR tidak melakukan pelanggaran etika," ujar Syafii.

Dia mengungkapkan, MKD juga bertugas menyampaikan kepada fraksi-fraksi di DPR RI tentang absensi kehadiran Anggota Dewan di paripurna, rapat di AKD ataupun rapat di Pansus. "Ini kan juga upaya-upaya yang kita lakukan agar mereka bisa mematuhi. Selain itu kita Anggota DPR, tidak boleh bangga dengan produk-produk luar negeri, tidak boleh ke dugem. Itu sudah diatur, itu kita sosialisasikan," ungkap Syafii.

Dia menjelaskan ada tiga pelanggaran yang ditetapkan oleh MKD, ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan konsekuensinya dinasihati, pelanggaran sedang dipindahkan dari komisi atau diturunkan jabatan, dan jika melakukan pelanggaran berat ada dua hukuman, bisa diskors minimal tiga bulan tapi bisa juga diberhentikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui MKD. ■

(eko.mpi) Foto:eko/hr

Dewan Ingatkan Pelindo II Agar Hati-hati Bangun Pelabuhan Internasional Kijing



Ketua Pansus Pelindo DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Ketua Pansus Pelindo DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan PT. Pelindo II agar hati-hati dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan pelabuhan Kijing karena dana pembangunan pelabuhan tersebut menggunakan *global bond* (surat utang bervaluta asing) sebesar Rp 21 triliun.

Menurut Rieke, penerbitan *global bond* itu sedianya untuk membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong, Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal. Namun, proyek-proyek seperti Pelabuhan Sorong, Kijing dan Tanjung Carat belum bisa dilanjutkan akibat persoalan administrasi yang belum beres.

Hal ini menjadi fakta bahwa *global bond* yang telah dilakukan tidak melalui perhitungan yang matang. Akibatnya, Rieke menambahkan, pihak Pelindo II sekarang terbebani bunga utang (di luar pokok utang) sebesar Rp 1 triliun per tahun.

Pembayaran bunga tersebut diambil dari laba PT Pelindo II yang juga berasal dari anak

perusahaan, bukan dari hasil pengembangan dana *global bond*. "Artinya, bisa jadi ada indikasi kerugian negara di proses tersebut," tutur Rieke.

Pada kesempatan yang sama anggota Pansus Pelindo Refrizal, menyatakan bahwa masalah pelabuhan ini sangat vital karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Kalbar. Selama ini untuk mengeksport salah satu komoditas utama Kalbar yaitu *Crude Palm Oil* (CPO), pengiriman harus melalui pelabuhan tetangga seperti Belawan sehingga pemerintah setempat tidak mendapatkan pajak dari kegiatan ekspor tersebut.

"Sampai saat ini kita tidak dapatkan devisa karena kita ekspor CPO dari pelabuhan lain.

Makanya kita minta apa yang menjadi hambatan, untuk mempermudah dan mempecepat sehingga pembangunan pelabuhan laut di Kijing segera terealisasi pada tahun 2019," tegas politisi PKS.

Hal senada disampaikan Direktur Teknik dan Manajemen Resiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Dani Rusli Utama mengatakan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing ini sudah mendesak terutama menurunkan logistik cost ekonomi yang ada di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Pelabuhan Dwikora saat ini sudah dioptimalisasi dan invest alat hingga kapasitas meningkat 2-3 kali lipat. Jika semula kapasitas kita 100 ribu Teus, sekarang sudah meningkat menjadi 250 ribu Teus, ujarnya.

Namun seiring waktu lahan yang ada sudah tidak memadai kemudian kapal yang hanya bisa masuk ke pelabuhan Pontianak relatif kecil. Padahal dari tahun ke tahun kebutuhan kapal

bertambah besar. Sehingga kapal besar tidak bisa masuk ke Pelabuhan Pontianak yang hanya memiliki kedalaman 6-7 meter saja.

Sementara untuk Pantai Kijing yang diusulkan akan dibangun pelabuhan yang memiliki kedalaman 12-15 meter, dengan harapan kapal besar dapat masuk. Kemudian dalam pembangunannya, harus memenuhi 3 prinsip diantaranya terminal peti kemas, curah cair dan *multipurpose*.

"Tahap pertama kita ajukan terminal peti kemas yang berfungsi sebagai *multipurpose* yang panjangnya sekitar 500 meter -1 KM, sementara untuk arealnya diperlukan 50-100 hektare," imbuhnya.

"Harapannya kapal-kapal yang datang bisa terlayani dengan baik di sini, kemudian biaya yang biasa pakai kapal kecil bisa lebih murah karena volumenya lebih murah," ujarnya. Kemudian dampak yang diharapkan adalah antisipasi ekonomi Kalimantan Barat yang dari tahun ke tahun meningkat.

"Apalagi kita akan ada panen raya CPO, tambang bauksit, kemudian industri tambang yang besar dapat difasilitasi," ujarnya. ■

(landri/sc), Foto : Andri/hr

Komisi II DPR RI Apresiasi Sumsel dapat Predikat Zona Hijau Ombudsman

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Tim yang dipimpin oleh Fandy Utomo memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumatera Selatan yang mendapat predikat provinsi dengan suara kepatuhan tinggi atau Zona Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 dengan skor 82,59.



Anggota Komisi II DPR RI, Fandy Utomo

Hal itu disampaikan pada saat pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Plt Gubernur Sumsel yang juga Setda Joko Imam Sentosa di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (20/04).

Dalam pertemuan tersebut, Fandy

memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat predikat top 35 dari 2.476 peserta inovasi pelayanan publik dari Kementerian PANRB dalam sistem pelayanan kesehatan mata satu atap atau Silamsat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa kebijakan Pelayanan Publik, diantaranya telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta Program Pelayanan Publik seperti Silamsat, mobil Samsat Keliling dan Mobil

Klinik Gigi Keliling.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani juga mengatakan, bagaimanapun pelayanan publik menjadi *Ultimate goal* dari reformasi birokrasi kita, karena itu tingkat kepuasan publik selalu diukur untuk mendekatkan ASN dengan publik. Dia menyarankan, untuk mengukur tingkat Pelayanan Publik langsung dari masyarakat, seperti disediakan formulir tanya jawab, dimana publik bisa menilai langsung puas atau tidaknya pelayanan tersebut.

"Sehingga ke depannya dengan kontrol kuat dan pelayanan dari publik langsung sebagai pengguna, maka reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik," ujar Mardani.

Menanggapi pertanyaan sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, Plt Joko Imam Sentosa menjelaskan, pengelolaan Sarana, Pra sarana dan atau Fasilitas Pelayanan Publik telah diterapkan pada unit-unit pelayanan agar terciptanya rasa nyaman kepada masyarakat. Seperti penerima layanan RS Ernaldi Bahar, RS Gigi dan Mulut, RS Khusus Paru, RS Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. ■

(eno.mpi), Foto:Kresno/ir.

Komisi II DPR RI dan Pemprov Kepri Sepakat Bentuk Pansus Batam



Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutahuruk

Tim Komisi II DPR RI dipimpin Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menggelar pertemuan dengan semua *stake holder* dalam rangka Kunjungan spesifik Panja Otonomi Daerah dan Sengketa Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, di ruang pertemuan Lantai 5 Gedung Graha Kepri Batam. Selasa (18/04).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas masalah sengketa kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.

DPR RI akan mendorong penyelesaian masalah kewenangan antar dua lembaga pemerintah di kota itu dari sisi politis. Pansus nantinya akan melibatkan beberapa komisi, di antaranya Komisi I, Komisi II dan Komisi VI.

"Kami akan memilih cara itu untuk selanjutnya bisa diputuskan di Rapat Paripurna dan menjadi terobosan agar masalah menjadi jernih," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura itu usai memimpin rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau.

Menurutnya, investasi di Batam menurun drastis dikarenakan sengketa kewenangan yang berlarut larut selama ini. Masalah sengketa kewenangan antara Pemkot dan BP Kawasan Batam harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat dan investasi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sepakat masalah sengketa kewenangan di Batam harus segera diselesaikan karena telah menjadi kendala pembangunan dan perkembangan ekonomi. Menyikapi usulan Pembentukan Pansus oleh DPR RI, Nurdin Basirun mengatakan "Itu kebijakan dari DPR, jadi terserah. Di pagar itu saya tidak boleh masuk, mereka yang punya wilayah,"

Sikap yang sama disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dengan berharap masalah kewenangan segera diatasi, bagaimanapun caranya, termasuk bila harus melalui Pansus DPR RI. ■

(dn,mp). Foto: Doeh/r

Dana Desa Membuat Kemiskinan Jauh Menurun

Angka kemiskinan di desa kini jauh menurun seiring pengalokasian Dana Desa (DD). Masyarakat desa pun bangga membangun desanya dan tak tergoda lagi pergi ke kota untuk mencari kerja.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan di Kendal, Jateng, usai mengikuti pertemuan dengan Bupati Kendal, Kamis (20/4). "Dana desa sudah nyata dirasakan manfaatnya, tidak saja oleh para kepala desa, tapi juga masyarakatnya. Mereka bangga jadi warga desa. Kemiskinan juga menurun. Ini bagian dari revolusi sosial."

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, DD memang harus dikawal agar tak ada penyimpangan yang merusak desain dan tata kelola yang sudah berjalan baik di desa. Apresiasi harus diberikan kepada para kepala desa yang sudah memimpin perubahan di desa dengan DD.

"Para kepala desa adalah patriot dan pejuang kita yang ada di desa. Mereka jauh dari niat korupsi," tandas Arteria.

Tujuan DD, sambung politisi dari dapil Jatim VI ini, tidak hanya untuk membangun desa secara fisik,

tapi juga untuk memberdayakan masyarakatnya. "Memang ada yang harus kami kritisi dari penggunaan DD. Jangan sampai orientasinya hanya pada pembangunan infrastruktur, tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat desa," ujar Arteria.

Sementara mengomentari penggunaan DD di Kabupaten Kendal, Arteria menilai, pengelolannya sangat baik. Saat ini Kendal mendapat Rp212 miliar DD. Serapan anggarannya dipastikan harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan Pemda Kendal sudah menerjemahkannya dengan sangat baik.

"Nawacita Presiden Jokowi sudah terpenuhi, yakni tiap desa akan menerima Rp1,4 miliar. Membangun desa dan membangun Indonesia dari pinggiran sudah terlaksana dengan paripurna," imbuh Arteria. ■



Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan

(mh,mp). Foto: husan/hr

Perempuan dapat Berperan Lebih Banyak Lagi di Dunia Politik

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai perlunya penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara dialektika demokrasi bertajuk "Kartini Bicara Pemilu" bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Perludem di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/4).

“ Kita membutuhkan lebih banyak perempuan potensial untuk masuk di dalam dunia politik dan kebijakan publik, yakni mereka yang memiliki kompetensi kepedulian dan integritas,” ujar Hetifah.

Ia meyakini, dengan peran perempuan yang lebih banyak lagi dalam dunia politik, maka akan menghasilkan produk-produk atau kebijakan yang jauh lebih baik bagi masyarakat. Sayangnya publik Negara ini belum bisa mengakui kemampuan perempuan dalam bidang politik.

Kemunculan perempuan di dunia politik saat ini, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Golkar, masih erat kaitannya dengan kembalinya aristokrasi lokal atau dinasti politik. Sehingga banyak yang meragukan kesiapan perempuan untuk mendedikasikan diri di dunia politik. Begitupun dengan partai politik yang dinilainya belum memberikan ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk berperan dalam bidang tersebut.

"Partai Politik sebagai sumber rekrutmen kader dan pemimpin juga belum sepenuhnya siap membuka ruang dan memberi afirmasi agar perempuan bisa mengejar ketertinggalannya. Masih diperlukan penguatan regulasi yang mencerminkan komitmen nasional untuk



Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat diskusi dialektika demokrasi

mendorong kesetaraan gender di politik," lanjutnya.

Oleh karena itu saat ini DPR RI dan pemerintah sedang menyusun Undang-undang Pemilu yang nantinya akan sangat penting bagi demokrasi dan keadilan gender di politik. Ia menilai pengaturan dalam undang-undang pemilu terkait afirmasi keterwakilan perempuan sejauh ini tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Itulah PR (Pekerjaan rumah) semua perempuan Indonesia untuk memastikan bahwa pengaturan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada perempuan tidak hanya untuk mencalonkan diri, namun juga untuk terpilih.

Sementara Direktur Perludem Titi Anggraeni mengatakan, peran perempuan dalam dunia politik bisa dilakukan di tiga

jenis pemilu, yakni Pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Namun sebenarnya menurutnya, keterwakilan perempuan di dunia politik bisa lebih luas dari ketiga instrumen tersebut. seperti dalam penyelenggara pemilu dan pemilih.

"Di Komisi Pemilihan

Umum (KPU) saja hanya ada 1 perempuan dari 7 Komisioner. Bawaslu hanya ada 1 perempuan dari 5 Komisioner yang ada. Oleh karena itu jumlah 30 persen kuota perempuan dalam calon legislatif itu penting untuk mempengaruhi keputusan. Jadi keterwakilan perempuan itu komprehensif," jelas Titi.

Ditambahkan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Dwi Septiani keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu tidak sekedar kekuasaan, melainkan untuk menjaga equilibrium atau titik keseimbangan kehidupan. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh RA Kartini dalam surat-suratnya yang ingin mewujudkan cita-cita besar bagi perempuan. ■

RUU Pemajuan Kebudayaan Disahkan Paripurna DPR

Rapat Paripurna Dewan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan menjadi Undang-Undang. RUU tentang Pemajuan Kebudayaan terdiri dari 9 Bab dan 61 Pasal. Sebelum mengetuk palu pengesahan, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon selaku pimpinan rapat pun menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

“Apakah RUU Pemajuan Kebudayaan dapat disetujui,” tanya Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4). Dan jawaban 'setuju' pun didengungkan oleh seluruh anggota dewan. Turut mendampingi Fadli di paripurna tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-PD) dan Taufik Kurniawan (F-PAN).

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya dalam laporannya menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini dimulai pada 12 April 2016. Pembahasan dimulai dengan rapat kerja dengan Mendikbud RI, Menpar RI, Menpan-RB RI, Menag RI, dan Menkumham RI, untuk menerima DIM yang disampaikan oleh pemerintah. Panja pun telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain Rapat Panja, Rapat Dengar Pendapat, hingga uji publik ke beberapa daerah.

"Setelah melalui berbagai rapat tersebut, proses pembahasan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan sudah berjalan selama tujuh kali masa sidang, karena terdapat materi krusial yang menjadi pembahasan panja, sehingga membutuhkan tiga kali perpanjangan waktu," jelas Riefky.

Kemudian, masih kata Riefky, pada tanggal 29 Maret 2017, Panja menyepakati perubahan judul RUU dari RUU tentang Kebudayaan menjadi RUU tentang Pemajuan Kebudayaan. Perubahan judul RUU mempertimbangkan muatan RUU yang akan diatur dan juga merujuk kepada ayat (1) Pasal 32 UUD NKRI Tahun 1945.

"Panja menyadari betul bahwa RUU tentang Pemajuan Kebudayaan ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa serta peradaban bangsa," imbuh politisi F-PD itu.

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja yang



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menyerahkan laporan hasil pembahasan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan kepada Pimpinan DPR RI

dilakukan pada tanggal 18 April 2017 seluruh fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyetujui terhadap RUU tentang Pemajuan Kebudayaan untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna. pemerintah pun menyampaikan persetujuannya.

Riefky menjelaskan, ada beberapa pokok pembahasan dalam RUU ini. Pertama, kebudayaan sebagai investasi bukan biaya. Dalam RUU ini ditegaskan bahwa kebudayaan merupakan investasi masa depan untuk membangun peradaban bangsa, sehingga harus ada keyakinan yang kuat bahwa dengan pemajuan kebudayaan, maka Indonesia akan maju dan dapat bertahan sampai usia bumi ini berakhir.

"Kemudian, kedepannya akan ada sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber dan dari berbagai kementerian/lembaga," kata Riefky.

Sistem itu, lanjut Riefky, disebut dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang berisi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan,

Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan. Data tersebut dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

"Sementara dalam hal pendanaan, selain melalui APBN dan APBD, sumber pendanaan kebudayaan lainnya adalah dana perwalian Kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah," imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Dana Perwalian Kebudayaan yang dimaksud adalah sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola dengan baik melalui sebuah lembaga wali amanat dan disalurkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan.

Dalam RUU ini juga dibahas mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Pemanfaatan Kebudayaan, Penghargaan, hingga pengaturan Sanksi.

Dalam kesempatan yang sama, Rapat Paripurna DPR RI ini juga mengesahkan RUU tentang Sistem Perbukuan. ■

**Kegiatan PKAKN BKD DPR RI
Studi Lapangan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Kota Manado**

Tim PKAKN bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP, Manado

Kualitas SDM Menjadi Faktor Penting

Kebijakan Rotasi Pegawai terutama yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi secara langsung sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Kota Manado. Hal tersebut dikemukakan oleh Frans Mawitjere, SH Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Manado, Sulawesi Utara, saat berdiskusi dengan Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI "Kualitas SDM dan latar belakang pendidikan yang sesuai menjadi faktor penting", ujar Frans. Manado (26/04).



Suasana diskusi Tim PKAKN dengan Pemkot Manado

Utara sudah menggunakan aplikasi SIMDA, permasalahan terkait SDM juga di ungkapkan oleh Kwinhatmaka selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. "Tugas BPKP dalam pendampingan terhadap Pemda dalam penerapan SAP Berbasis Akruar terhambat oleh kebijakan rotasi SDM untuk pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun yang sudah dibekali bimbingan teknis dan *workshop* seputar SAP berbasis akruar. Selain itu, jumlah auditor di Inspektorat daerah juga kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas" ujar Kwinhatmaka.



Kepala Pusat PKAKN menyerahkan cendera mata kepada Kepala Perwakilan BPK Manado

BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan juga mendorong sinergitas APIP Daerah Provinsi Sulawesi Utara menuju *level 3*, ungkapinya lebih lanjut.

Ditempat dan waktu yang berbeda, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Tangga M. Purba menyampaikan bahwa 16 Pemda di Provinsi Sulawesi Utara sudah sepenuhnya mengimplementasikan SAP Berbasis Akruar di tahun anggaran 2015. Dari 16 Pemda tersebut, 12 Pemda telah

berhasil meraih opini WTP dan 4 Pemda masih WDP. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP Berbasis Akruar di Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan baik.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2105 di Pemda Provinsi Sulawesi Utara dan 4 Kabupaten

Kota yaitu Kota Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kota Tomohon yang bertujuan untuk melihat kesiapan Pemda dalam penerapan SAP Berbasis Akruar. Senada dengan Pemkot dan BPKP, Tangga

menyatakan, "Hasil pemeriksaan tersebut, muncul terutama terkait komitmen Kepala Daerah dalam hal kebijakan mutasi SDM yang sudah mendapatkan bimbingan teknis mengenai penerapan SAP berbasis akruar dan penempatan pegawai yang kurang tepat di satker," Urainya.

Selain itu, permasalahan terkait penggunaan aplikasi SIMDA juga muncul terutama di kabupaten yang letak geografisnya berada di kepulauan dan pegunungan dengan keterbatasan jangkauan sinyal komunikasi dan listrik, sehingga menyulitkan Pemda di daerah-daerah tersebut untuk dapat menginput data keuangan mereka secara *real time*. ■

(Tim PKAKN), Foto : Istimewa

Kedatangan Tim PKAKN yang dipimpin oleh Helmizar selaku Kepala Pusat PKAKN ke kota Manado Sulut adalah untuk melihat secara langsung dan menganalisis pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam Penerapan SAP berbasis Akruar pada LKPD TA 2015 dan 2016, serta untuk melihat sejauh mana upaya Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna memperbaiki implementasi SAP berbasis Akruar TA 2016.

Meskipun seluruh Pemda di Provinsi Sulawesi

Komisi XI DPR RI Apresiasi KPP BC Pantoloan Palu Sulteng

Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI mengapresiasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang telah berhasil dalam upaya peningkatan pengawasan untuk menekan peredaran barang ilegal dan mencegah kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,3 miliar.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI Prakoso dalam keterangan persnya sebelum memusnahkan 4,6 juta rokok dan 72 minuman keras (miras) ilegal di halaman KPPBC Tipe Pratama Pantoloan, Palu, Sulteng, Jum'at (21/04).

Menurut Prakoso, langkah Bea Cukai tersebut sekaligus menjadi komitmen instansi ini dalam menegakkan aturan terhadap pihak-pihak yang telah merusak tatanan perekonomian bangsa.

Ia pun berharap, langkah tersebut setidaknya meminimalisir kerugian negara.

"Sekali lagi, kami beri apresiasi kepada jajaran KPPBC Pantoloan yang telah berhasil dan berkomitmen menegakkan peraturan kepabeanan dan cukai. Ini merupakan simbolisasi dan komitmen penegakan aturan," tutupnya.

Sementara Gubernur Provinsi Sulteng yang diwakili Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Arif Latjuba, mengatakan pemusnahan rokok dan miras ilegal ini merupakan bukti nyata kinerja pihak Bea Cukai dalam menekan pengawasan barang ilegal di wilayah Sulteng.

"Saya berharap dengan tindakan pemusnahan barang ilegal yang dilakukan Bea Cukai Sulteng dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba memasarkan barang ilegal tersebut masuk dalam dunia pemasaran di Sulteng, dan tindakan tegas yang dilakukan bisa diperhatikan oleh masyarakat untuk lebih berhati-hati mengkonsumsi barang ilegal," pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang



Ketua Tim Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, M.Prakosa bersama Anggota Tim saat Kunjungan ke KPPBC Tipe Pratama Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah.

Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sulawesi, Agus Amiwijaya dalam keterangan persnya, mengatakan rokok dan miras ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil

penindakan di toko-toko dan pasar yang dilakukan oleh KPPBC Pantoloan periode pengawasan Januari-Maret 2017. Peredaran barang-barang ilegal tersebut diketahui berasal dari wilayah Makassar, Sulsel, dengan proses produksi di sekitaran wilayah Jawa Tengah.

Penindakan yang dilakukan pihak KPPBC Pantoloan ini, sambungnya, merupakan upaya peningkatan pengawasan untuk menekan peredaran barang ilegal dan mencegah kerugian negara. "Keseluruhan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp2,4 miliar, dengan perkiraan kerugian negara yang berhasil dicegah dari penindakan ini mencapai Rp1,3 miliar," ungkapnya. ■

(w.m.p), Foto: iwan armianias/ht.

Komisi XI DPR RI Kunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang

Ketua Tim Kunker Komisi/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafizs Tohir memimpin kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan didampingi 12 orang Anggota Dewan, Jum'at (21/04). Tim langsung meninjau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Seusai meninjau Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tim disambut Joko Iman Santoso Sekretaris Daerah Prov. Sumsel, Ken Dwijugasteady Direktur Jenderal Pajak, M. Ismiransyah Zain Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung serta jajaran di ruang pertemuan Kantor Pelayanan Pajak.

"Sebagaimana kita ketahui penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung negara dalam APBN pada tahun 2017 dengan jumlah penerimaan 86,1% dari total pendapatan

Ketidakpastian Status Kerja Pilot Menjadi Perhatian Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Jika Pemerintah masih lamban dalam menyiapkan Naskah Akademik, maka DPR RI melalui Baleg akan segera mengambil alih inisiasi revisi UU ini.

“ Kami sudah menerima dan mendengar masukkan para pilot, mengenai kontrak kerjanya selama 20 tahun dan denda pinalti 1 juta dollar US apabila keluar sebelum masa kerja habis. Hal ini akan kita teruskan saat raker dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi yang menerima IPI tersebut.

Dede menjelaskan, kalau merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jelas hal itu melanggar UU, sebab pekerja inti di dalam undang-undang harus diangkat menjadi pegawai tetap jika sudah bekerja lebih dari 3 tahun.

"Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) tidak dibolehkan untuk pekerja inti. Lebih dari 2 atau 3 tahun harus diangkat menjadi pegawai tetap. Selain dengan



Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi saat menerima IPI

Kemnaker kita juga akan panggil Kementerian Perhubungan, untuk mendapat penjelasan," ungkapnya.

Lebih lanjut politisi partai Demokrat itu juga mengatakan PKWTT yang diberlakukan kepada hampir 60 persen pilot di Indonesia sangat berdampak pada psikis para pilot, karena mereka terpaksa bekerja karena ada

ancaman 1 juta dollar US dan karena status kontrak mereka khawatir diberhentikan kapan saja.

"Maka dari itu kami akan mendalami hal ini, dari denda pinalti yang besar, biaya pendidikan, hak-haknya serta kewajibanya.

Sebab Investasi terbesar dari sebuah perusahaan penerbangan itu bukan hanya pesawat saja tetapi si penerbang karena dia menjalankan alat yang jutaan dolar yang berisi manusia, mereka perlu mendapat suatu kelayakan," katanya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, salah satu perwakilan dari IPI Kukuh Bambang W mengatakan terkait permasalahan ini, pihaknya sudah

meminta tidak lanjut dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun belum ada tindakan spesifik.

"Sementara skala kerja kontrak kami dan ancaman pinalti 1 juta dollar US berjalan terus. Maka dari itu kami ke sini mengadu dan berharap dari pertemuan ini mendapat kepastian status kerja," jelasnya. ■

(innm/so), Foto : Kresno/hr



Ketua Tim Kunker Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafizs Tohir

negara 2017 atau sebesar 1.498,8 Triliun. Selain itu, pajak penghasilan yang ditargetkan 116 Triliun, pajak pertambahan nilai 76 Triliun, dan PPH Migas ditargetkan mencapai 11,7 Triliun," kata Hafizs dalam pengantarnya.

dibantu oleh anggota dewan dari Komisi XI dan terkait penerimaan pajak Sumatra Selatan tahun lalu mencapai 100,28%. Tahun ini di targetkan 13,3 Triliun. Penerimaan Negara katanya dari tiga yakni dari DJP dan DJBC

Dalam kesempatan ini Hafizs berharap pihaknya bisa mendapatkan data dan informasi terkait dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Selain itu dapat disampaikan realisasi penerimaan bea dan cukai serta penerimaan pajak serta upaya - upaya dalam mencapai target dan kendala - kendala yang dihadapi.

Pajak Ken Dwijugiasteady mengatakan, ini merupakan salah satu kerja sama yang baik bahwa nanti setiap ada kesulitan akan

serta penerimaan bukan pajak," Jadi nanti kalau kita lihat *text ratio* terhitung dari pajak-pajak yang lain bisa seperti halnya negara lain." katanya.

Ditambahkan, target dan pencapaian tiga tahun terakhir pada tahun 2016, bea masuk 106% sedangkan bea keluar ada 122%. Cukai ada 71%, total untuk Sumatra Selatan 107%. Di luar kepabeanan dan cukai pihaknya juga memungut pajak dalam rangka import dimana tahun 2016 PPh totalnya 3,5 Triliun. Sedangkan 2017 sampai triwulan pertama bulan Maret mencapai 35%, bea keluar 242%, sementara cukai baru 0,69%.

" Mungkin dalam waktu dekat kami akan mengajukan revisi. Untuk import 66% itu propan hutan, kemudian 19% gula, mesin/sparepart 7%, sapi 4%, dan komoditas lain sekitar 4%," imbuh Rendi Kakanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung. ■

(hr.mpi), Foto : Eka Hindra/hr

Pemasukan Bea Cukai dari Pelabuhan Batu Ampar Cenderung Stagnan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan, kunjungannya kali ini untuk melihat masalah apa yang terjadi Kanwil Bea Cukai Batam. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan dan menurun. Tim Kunspek juga berkesempatan mengunjungi pelabuhan Batu Ampar Batam.

“ Permasalahan yang kita lihat antara kewenangan Badan Pelaksana Batam dengan aparat Bea Cukai. Peralatan yang sebenarnya diperlukan oleh aparat Bea Cukai ternyata miliknya Badan Pengusaha (BP) Batam. Ini kan sebenarnya tidak boleh, *policy* tetap harus ada di Bea Cukai,” ungkap Supriyatno saat menggelar pertemuan dengan Kanwil Bea Cukai Batam Jumat (21/04).

Menurutnya, karena *policy* penerimaan ada di bea cukai akhirnya ada tumpang tindih kewenangan dan *policy* yang berbeda - beda. Atas masalah ini dia menekankan, harus segera disampaikan kepada Kementerian Keuangan atau juga kepada Bea dan Cukai Pusat sehingga ke depan akan mendapatkan keuntungan dari sektor kepabeanan bea cukai Kanwil Batam.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menambahkan bahwa alat *scanner x-ray* untuk mendeteksi isi muatan mobil-mobil pengangkut barang tersebut ternyata masih dimiliki oleh otoritas pelabuhan. Alat *scanner* tersebut pun jika hujan datang sering kali dimatikan karena alasan terendam air .

"Bagaimana untuk mendeteksi barang bawaan truck-truck keluar masuk pelabuhan jika alat *scanner x-ray* nya selalu dimatikan, truck-truck barang bebas keluar masuk tanpa



Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR RI, Soepriyatno

ada pemeriksaan. Harusnya alat tersebut *policy* nya ada di bea cukai, tetapi untuk saat ini bea cukai Batam belum memiliki," ujarnya.

Ditambahkan bahwa potensial *lose* dari sektor kepabeanan di pelabuhan Batu Ampar ini sangat besar, karena alat *x-ray scanner* yang ada di pelabuhan selalu dimatikan lantaran alasan alat pendeteksi tersebut berada di bawah dan sering terendam air ketika hujan turun.

"Bagaimana untuk mendeteksi barang bawaan truck yang keluar masuk pelabuhan jika alat *scanner* tersebut selalu dimatikan. Akibatnya truck-truck dapat bebas keluar masuk pelabuhan tanpa pemeriksaan,

harusnya dicarikan solusi bagaimana walau hujan turun alat tersebut tetap di hidupkan," tandas Soepriyatno.

Untuk itu lanjutnya, dalam waktu dekat Komisi XI akan mengadakan rapat kerja dengan Menkeu atau rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bea Cukai menyampaikan

terobosan-terobosan apa yang harus dilakukan. Karena untuk saat ini barang yang akan di export maupun diimport masih pada satu tempat.

Lebih lanjut Soepriyatno meminta agar barang yang akan di export dan import harus dipisahkan, karena jika digabung pengawasan barang itu jadi lemah. Mengenai aturan-aturan kerugian negara harus diklarifikasi, karena di Pelabuhan Batu Ampar sangat rentan untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan oleh oknum-oknum aparat. Ke depan Undang-Undang tentang Kepabeanan pun akan diubah untuk menguatkan kembali instansi tersebut. ■

(azka.mpi). Foto:azka/hr



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhiddin Said saat meninjau Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Sulteng

Komisi V DPR RI Dukung Pengembangan Bandara Luwuk Secepatnya

Kabupaten Banggai dengan ibukotanya Luwuk adalah salah satu kota yang sangat potensial, di mana perkembangan ekonominya sangat pesat setelah ditemukannya beberapa sumur minyak yang berdampak pada perkembangan di berbagai bidang khususnya perekonomian dengan geliat usahanya.

Hal ini harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai yang merupakan perhatian serius DPR RI. Dukungan itu diberikan anggota Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik di beberapa tempat infrastruktur, Kamis (20/04).

Saat meninjau Bandara Syukuran Aminuddin Amir Bubung Luwuk, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhiddin Said mengatakan, dalam 3 tahun terakhir ini perkembangan Kota Luwuk sangat pesat yang tentu saja berpengaruh pada arus transportasi khususnya perhubungan udara "Bandara di sini sudah cukup padat tetapi dari sisi keselamatan masih perlu ada peningkatan seperti tambahan runway, dengan keamanan sisi baratnya yang perlu ada pengirisan pada tebing bukit untuk memberikan area pengaman bila terjadi sesuatu," ujar Muhiddin.

Hal ini diperkuat anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Rendy Lamadjido dengan menekankan, bandara ini telah berada pada titik maksimal, tidak memadai untuk mengakomodir lonjakan penumpang yang telah terjadi.

"Perkembangan di sini mengakibatkan arus transportasi udara semakin pesat. Kita lihat bahwa 5 penerbangan per hari ini menjadikan bandara mencapai titik jenuh sehingga perlu ada perluasan," ungkap Rendy.

Dijelaskannya, faktor keamanan dan keselamatan pada bandara adalah hal signifikan yang utama segera dikerjakan. "Landasan *runway* tambahan adalah sejauh 250 meter dan sisi sebelah kanan ada semacam tebing yang harusnya dipotong sejauh 50 meter hingga bila terjadi sesuatu pada pesawat, maka dimungkinkan tetap aman," jelas Rendy. ■

(ran.mp), Foto:rizka/hr

Komisi III Apresiasi Upaya Polda Sumut Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba

Komisi III DPR RI apresiasi kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam upaya pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumut.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa saat rapat kerja dengan Kapolda Sumut dan Kepala BNN Provinsi Sumut dan jajarannya.

"Kami apresiasi upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Sumut", kata Desmond yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI di Kantor Polda Sumut, Medan, Kamis (20/04).

Dengan upaya yang dilakukan Polda Sumut, tegas Desmond, mestinya semakin ke sini kasus narkoba ini semakin menurun.

"Mungkin nambah pada posisi penangkapannya, pencegahan seimbang dengan penangkapannya, maka hasil lapasnya menurun", papar politisi Gerindra tersebut.

Lebih lanjut ia mempertanyakan, menurutnya ada yang luar biasa, apakah dari barang sitaan ketika dimusnahkan ada yang lolos. Pasalnya menurut data yang dimiliki Komisi III DPR RI, ada oknum polisi yang menjadi pengedar dari barang haram ini.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Kapolda Sumut Rycko Amelza Dahniel memaparkan kebijakan Polda Sumut dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Sumut.

"Kami melakukan tindakan tegas terhadap kasus narkoba. Saya perintahkan bandar narkoba tembak mati kemudian saya ekspose ke media. Termasuk anggota Polri dan TNI yang menjadi bandar", mantap Rycko.



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa

Apa yang terjadi setelah itu? Lebih lanjut ia menjelaskan barang berkurang sementara pecandunya tetap. "Suplay berkurang, *demand* bertambah, harga menjadi naik," imbuhnya.

Sikap tegas Polda Sumut ini, berdampak pada meningkatnya pada kasus lain, seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan gara-gara narkoba. "Awalnya ia menjual barang dan motornya sendiri, kemudian melirik motor tetangga dan lainnya", terangnya.

Melihat hal tersebut, Rycko pun merubah pola dan strategi Polda Sumut dalam memberantas peredaran narkoba yaitu "Bersih-bersih ke dalam, hajar ke luar".

Dijelaskan Rycko, Polda Sumut harus bersih dari masalah narkoba sebelum hajar ke luar. Tindakan pertama membersihkan seluruh asrama Polri yang ada di wilayah hukum Polda Sumut. Saat ini, 34 asrama dari 37 asrama sudah bersih dan bebas dari narkoba.

"Tanggal 3 Mei kami akan membersihkan 3 asrama lagi, setelah itu kami akan deklarasikan bahwa seluruh asrama Polri di Sumut sudah bersih dan bebas dari narkoba", tegasnya. ■

(sc), Foto:suciatl/hr

Pasokan Listrik dan Sinyal Internet Jadi Persoalan UNBK Kalsel

Kurang optimalnya pasokan listrik dan sinyal internet di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan permasalahan utama dalam persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam menekankan, permasalahan ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah.

“Masalah yang menjadi sorotan di sini yakni permasalahan listrik mati dan sinyal internet saat UNBK berlangsung. Ini kan tragis sekali, padahal Kalimantan sendiri merupakan tempat penghasil sumber energi batubara, yang seharusnya persoalan mati listrik tersebut tidak perlu terjadi. Nah, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” kata Ridwan usai pertemuan Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Kalsel, Jumat (21/04).

Politisi F-PG itu turut menghimbau Pemerintah untuk segera menentukan skala prioritas terkait permasalahan pendidikan di Indonesia. “Memang semuanya kembali lagi ke anggaran, tapi jika sistem pendidikan bisa segera dibuat, tentunya harapan dan target-target pendidikan yang sudah dicanangkan akan tercapai. Maka dari itu harus ada skala prioritas. Menurut saya, skala prioritas utama kita sebagai bangsa dan negara ini adalah pendidikan. Ini harga mati,” tegas Ridwan.

Ia menambahkan terkait sistem pendidikan, pemerintah seharusnya tanggap dalam melengkapi sarpras pendidikan yang masih minim. Menurutnya, kondisi sarpras yang ada saat ini tidak maksimal. “Seharusnya dalam sistem pendidikan itu, sarprasnya disiapkan terlebih dahulu baru diterapkan. Kondisi sekarang seperti tambal sulam. Konsep sudah dijalankan namun sarpras pendukungnya belum semuanya siap dan merata. Akhirnya terjadi disparitas antara daerah tertinggal dengan daerah perkotaan. Bagaimana kualitas mau disamakan jika sarprasnya saja tidak siap,” pungkasnya.

Lebih lanjut Politisi asal dapil Jatim V itu



Anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam

berharap ada suatu perubahan kebijakan politik dari Presiden Joko Widodo terhadap keberpihakannya kepada pendidikan, agar ke depan kualitasnya mencapai sasaran.

“Karena fungsi pendidikan ini membutuhkan suatu perubahan sistem keberpihakan, tentunya dengan harapan kualitas pendidikan kita itu akan merata dan menyeluruh di seluruh Indonesia,” harapnya.

Sementara itu terkait persoalan listrik dan sinyal internet dalam pelaksanaan UNBK, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Kalsel Siswansyah, mendorong keikutsertaan PLN dan Telkom untuk menyukseskan pelaksanaan UNBK 2017 di Kalsel.

Diantaranya dengan menjaga aliran listrik dan penguatan sinyal yang stabil sehingga peserta ujian dapat berkonsentrasi menyelesaikan soal dengan baik. ■

(tra.mp), Foto:titara/hr

Kestabilan Jaringan dan Ketersediaan Listrik Jadi Masalah UNBK

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (F-PG) meninjau persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Presiden, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/04).

“Pada hari ini kami meninjau SMP Presiden terkait persiapan pelaksanaan UNBK di tingkat SMP, kami ingin mendapat informasi yang sejujur-jujurnya dalam persiapan UNBK ini,” kata Ferdi.

“Harapannya kami mendapat informasi yang jelas dari sekolah dan peserta didik serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kemudian akan kami buat kesimpulan Panja



Komisi X DPR RI Tinjau Persiapan Pelaksanaan UNBK SMPN 1 Medan

Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 di Kota Medan, Sumatera Utara dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra mengutarakan UNBK adalah suatu program yang sangat strategis dalam rangka ke depan meningkatkan integritas dari siswa.

Sutan menjelaskan pada kunjungan di Provinsi Sumatera Utara ini, Komisi X melakukan dialog dan mendapatkan beberapa informasi, ternyata di Kota Medan satu-satunya sekolah negeri yang dapat menyelenggarakan UNBK secara mandiri hanya SMPN 1 Medan.

"SMPN 1 Medan ini ke depan bisa menjadi contoh bagi SMP-SMP yang lain tentang partisipasi dan keaktifannya. Saya yakin ini karena koordinasinya baik," ujarnya di SMPN 1 Medan, Jum'at, (21/4).

Terhadap pelaksanaan UN yang nanti dilaksanakan pada 2, 3, 4 dan 8 Mei, harapan Komisi X agar bisa berjalan dengan baik lancar dan integritasnya menjadi faktor utama.

"Kalau dulu ada saja yang sibuk membuat

contekan atau kunci jawaban, tapi kalau dengan UNBK tidak akan bisa lagi. Inilah salah satu kecerdasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan saya mengapresiasi kerjanya," katanya.

Terkait masalah infrastruktur UNBK, yaitu komputer, di SMPN 1 Medan ini yang akan mengikuti UNBK 382 orang tapi yang baru tersedia hanya 37 komputer. Artinya masih membutuhkan 115 Komputer lagi. Dengan proaktif kepala sekolah dan dinas yang mengikuti semua elemen masyarakat sehingga dapat memenuhi kekurangan kebutuhan komputer ini.

"Sekolah-sekolah lain pun kalau mau berkoordinasi dengan baik dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kejujuran ini pasti bisa seperti ini," paparnya.

Oleh karena itu, Komisi X terus mendorong agar sekolah-sekolah yang lain dapat menerapkan UNBK, karena ini solusi



Tim Komisi X DPR RI saat kunjungan spesifik ke SMPN 1 di Kota Medan, Sumatera Utara

pendidikan kita agar ke depan betul-betul berkualitas.

Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Supriano menyampaikan, sampai sekarang kesiapan pelaksanaan UNBK pada tingkat SMP terkait sarana dan prasarana menggunakan yang sekolah miliki atau bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat.

"Melalui UNBK, kita dorong agar integritas lebih baik lagi, melalui kerjasama antara orang tua, sekolah dan masyarakat," ujarnya. ■

(es,mp). Foto: Agung/hr



Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Evaluasi Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah," harapnya.

Politisi asal F-PG ini juga mengatakan

dilakukan beberapa kali uji coba dan tidak ada masalah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa

bahwa yang menarik dari kunjungan ini adalah pada paket C juga diterapkan UNBK dan kami ingin mendapat konfirmasi lebih lanjut dari persiapan ini karena ini merupakan hal yang baru.

"Yang kami dapatkan di SMP Presiden ini terkait persiapan yang dilaksanakan tampak tidak terlalu bermasalah karena sekolah ini sudah

mendapatkan temuan jaringan terkadang error dan masalah ketersediaan listrik, "Mengenai jaringan juga akan kami tanyakan tingkat kestabilannya, disamping itu juga masalah ketersediaan listrik untuk persiapan pelaksanaan UNBK, semuanya akan kami tanyakan ke instansi terkait," katanya.

"Ketersediaan listrik dan jaringan harusnya pemerintah sudah menjamin di tiap sekolah tidak ada masalah dan ini harusnya dilakukan secara bertahap serta matang," tambahnya.

"Sebaiknya dalam pelaksanaan UNBK yang akan datang pemerintah melakukan secara bertahap dan matang, harus dilakukan secara komprehensif melihat kondisi peserta didik, sarana dan prasarana dan kondisi tenaga pengajar/guru," tutupnya. ■

(has,mp). Foto:hasbi/hr

Anggota Dewan Pengawas BPKH Ditetapkan DPR RI

DPR RI telah menetapkan 5 Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat, yaitu Pengawasan Syariah BPKH Dr. KH. Marsudi Syuhud, Pengawasan Pengelolaan Keuangan BPKH Ir. Suhaji Lestiadi, ME, serta Pengawasan Umum BPKH Dr. Yuslam Fauzi, Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, AK, dan Dr. Abd Hamid Paddu, MA.

Ketua Komisi VIII M. Ali Taher mengatakan Dewan Pengawas BPKH mempunyai kewenangan strategis memberikan persetujuan, yaitu atas rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji, serta penempatan dan investasi keuangan haji.

"Dewan Pengawas harus bersinergi dengan Badan Pelaksana BPKH untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan haji, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi maslahatan umat Islam," katanya, saat menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Anggota Dewan Pengawas BPKH dari Unsur Masyarakat, di Gedung DPR RI, Kamis, (27/04).

Penetapan terhadap 5 Anggota Dewan Pengawas tersebut telah melalui uji



Pimpinan DPR RI bersama Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji terpilih

kelayakan dan kepatutan. Komisi VIII telah menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan haji.

"Komisi VIII melakukan uji kelayakan dan kelayakan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas BPKH dengan mengedepankan prinsip kompetensi," ujar

Ali Taher.

Patut diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Dewan Pengawasan BPKH terdiri atas 7 orang anggota yang berasal dari profesional, 2 orang dari unsur pemerintah dan 5 orang dari unsur masyarakat. ■

(as/so). Foto: iwan armanias/hr

Paripurna DPR RI Setujui 5 Calon Anggota Dewas LPP TVRI

Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menyetujui 5 orang kandidat dari unsur pemerintah, masyarakat, dan TVRI untuk menjadi calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dewas LPP TVRI) setelah melalui Uji Keputusan dan Kelayakan di Komisi I DPR RI.

“Calon Anggota Dewas LPP TVRI yang terpilih tersebut adalah Maryuni Kabul Budiono (unsur pemerintah), Supra Wimbarti (unsur Masyarakat), Made Ayu Dwie Mahenny (unsur TVRI), Arief Hidayat Thamrin (unsur Masyarakat), dan Pamungkas Trishadiatmoko (unsur masyarakat),” papar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/04).

Sementara itu dalam laporannya dihadapan para peserta Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, dengan disetujuinya 5 orang Calon Anggota Dewas LPP TVRI dalam Rapat Paripurna DPR RI itu, selanjutnya akan bertugas untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Kami berharap Anggota Dewas LPP TVRI yang telah disetujui berdasarkan hasil Uji Keputusan dan Kelayakan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Banyak Kejanggalan Dalam Pengelolaan Tanjung Carat

Pansus Pelindo II DPR RI menemukan banyak kejanggalan dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang oleh PT. Pelindo II. Dari persoalan dana investasi yang fantastis hingga penggunaan dua konsultan jadi temuan menarik.



Anggota Pansus Pelindo II, Wahyu Sanjaya

“Demikian dikemukakan Anggota Pansus Wahyu Sanjaya usai memimpin pertemuan dengan direksi Pelindo II dan otoritas pelabuhan di Palembang, Selasa (25/4). Menurut Wahyu,

penggunaan dua konsultan sekaligus dalam satu tahun patut dipertanyakan. "Ini membingungkan, karena biasanya satu konsultan bekerja dalam satu tahun untuk proyek tertentu saja. Mengapa ada dua konsultan pada tahun yang sama."

Tugas konsultan, lanjut politisi Partai Demokrat ini, melakukan studi kelayakan atas pengembangan pelabuhan Tanjung Carat, Palembang. "Kita minta mereka memberikan draf kontraknya sekaligus proses penunjukkannya seperti apa. Kita ingin tahu nilai kontraknya berapa. Kita tidak bermaksud mencampuri kinerja mereka. Tapi, kita hanya ingin melihat apakah normal nilai kontraknya," tutur Wahyu lebih lanjut.

Di Pelindo II ini, sambung Wahyu lagi, banyak kontrak yang nilainya fantastis dan tidak diketahui *endingnya* seperti apa. Bahkan, ada temuan 5 juta USD per bulan

untuk nilai kontrak pengembangan. Ini angka yang fantastis. Selain itu, ada investasi sekitar 3,3 miliar USD yang patut dipertanyakan. Kalau investasinya 500 juta USD masih wajar.

"Kita ingin menelaah lebih jauh apakah ada kejanggalan-kejanggalan dalam nilai proyek tersebut. Pelabuhan Tanjung Carat, memang, dibutuhkan di Palembang. Untuk itu, harus mampu melihat dengan cermat apa saja yang bisa dikembangkan di sini. Kalau Kawasan Ekonomi Khususnya belum selesai, nanti bisa jadi pelabuhan mati, karena belum berjalan. Dan kelak akses jalan menuju pelabuhan dan KEK harus terintegrasi," papar Anggota Komisi VI ini.

Mengomentari soal *global bond* di Pelindo II Tanjung Carat, Wahyu mengatakan belum ada. Kalau pun dilaksanakan sekarang tentu tidak *visible*. Bila nanti Pansus menemukan kerugian negara, akan ditindaklanjuti ke BPK dan penegak hukum. ■

(mh/so), Foto: Husen/hr.

untuk membawa TVRI ke arah yang lebih baik," ucap Meutya.

Komisi I DPR RI mengucapkan terimakasih kepada Anggota Dewas LPP TVRI sebelumnya yang telah melaksanakan tugasnya selama 5 tahun, lanjutnya, Komisi I juga berharap kepada Anggota Dewas yang baru dapat melanjutkan serta meningkatkan pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.

"Komisi I DPR RI telah melaksanakan proses Keputusan dan Kelayakan terhadap 11 orang Calon Anggota Dewas LPP TVRI pada tanggal dan 11 April 2017. Proses Uji kepatutan dan Kelayakan berlangsung secara terbuka, dan masing-masing calon telah menyampaikan visi dan misinya. Pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 11 April 2017 telah diputuskan 5 orang calon Dewas LPP TVRI tersebut berdasarkan suara terbanyak. ■ (dep/so), Foto: jayadi/hr.



Pimpinan DPR RI berfoto bersama Dewas LPP TVRI terpilih

DPR RI Setujui Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2016-2020

Pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis (27/04), Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota Komite Badan Pengaturan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Periode 2016-2020. Komisi VII DPR RI telah memilih Calon Anggota Komite dengan proses pemungutan suara secara terbuka yang dilakukan oleh 52 anggota komisi.

“Perkenalkan saya mewakili Komisi VII DPR RI melaporkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2016-2020 yang telah dilaksanakan Komisi VII DPR RI,” papar Gus dalam sambutannya di hadapan Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya, kata Gus Irawan, melalui beberapa tahap proses persidangan di Komisi VII, dari 22 calon diperoleh 9 calon anggota. Setelah selesai proses di Komisi VII, lalu diserahkan ke Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017 yang dipimpin Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam Fadli Zon ini. Tanpa ada penolakan

rapat paripurna menyetujui sembilan anggota Komite BPH Migas 2016-2020 dan terpilih sebagai Ketua Komite BPH Migas M. Fansurullah Asa.

Adapun dasar pelaksanaan proses kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan Komisi VII DPR RI berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lalu dipertegas dengan tiga Peraturan Pemerintah tentang badan pengaturan minyak dan kegiatan pengangkutan gas, serta tentang kegiatan usaha hilir migas Nomor 36 Tahun 2004 dan Nomor 30 Tahun 2009.

Proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi VII DPR dalam

pelaksanaannya dibagi atas tiga tahap, pertama pemaparan visi misi, kedua memberikan penilaian terhadap calon anggota dan ketua Komite BPH Migas, dan yang ketiga menyetujui secara aklamasi Ketua Komite BPH Migas Periode 2016-2020.

Berikut nama sembilan anggota serta ketua Komite BPH Migas 2016-2020, antara lain Henry Ahmad, Ahmad Rizal, Sumihar Panjaitan, Hari Prayogo, M. Fansurullah Asa, Muhammad Ibnu Fajar, Jugi Prajogo, Saryono Hadiwidjojo, dan Mardiansyah Lobo Balai. Selanjutnya setelah disetujui dalam Rapat paripurna DPR RI, sembilan nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden RI guna mendapat penetapan dan pelantikan. ■

(eko/sc) - Foto: jayadi/hr



Pimpinan DPR RI berfoto bersama anggota Komite BPH Migas Periode 2016-2020



Dewan Nilai Posisi Sumber Air Bagi Pencetakan Sawah Baru Penting

dokumentasi : Teka

Ada tiga hal yang ditekankan Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Munzir saat RDP dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/04) yakni pemisahan item pekerjaan yang diberikan kepada TNI dalam pencetakan sawah baru, perlu dipikirkan posisi sumber air ketika akan melakukan pencetakan sawah baru, dan sinkronisasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah yang bersangkutan.

“ Kerjasama pencetakan sawah yang dilakukan dengan melibatkan TNI, memang hasilnya luar biasa bagus. Namun kita juga tidak akan menutup mata terhadap informasi dan laporan bahwa ada hal-hal yang mesti ditingkatkan dan diperbaiki, oleh karenanya perlu dilakukan pemisahan dalam hal anggaran yang terkait dengan pengerjaan fisik. Tidak usah dibuat satu perencanaan yang menyeluruh, sehingga menyulitkan dalam proses evaluasi,” ujar Ibnu.

Menurutnya, hal itu karena memang ada anggaran yang berada diluar peruntukan pencetakan sawah itu, seperti pembuatan gorong-gorong dan sebagainya yang juga menjadi bagian yang disulitkan oleh pihak TNI.

"Pemisahan ini penting untuk dilakukan dengan tujuan agar kalau terjadi sesuatu, maka lebih mudah bagi kita untuk memonitoring,



Anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Munzir.

melakukan pemeriksaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan," ucapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman dan kunjungan di lapangan yang telah lakukannya ke daerah Kabupaten Wajo

Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat ada hal-hal yang menjadi kesulitan yakni sumber mata air yang letaknya agak jauh dari lokasi pencetakan sawah.

"Ke depan, dalam proses pencetakan sawah harus dipikirkan lokasi sumber airnya. Jangan sampai ada pencetakan sawah yang tidak memiliki saluran tersiernya hingga mengalami kesulitan air. Akhirnya menjadi lahan yang tidak sesuai harapan dalam proses pencetakan sawah," tegasnya.

Ibnu memaparkan bahwa saat dirinya berkunjung ke Mamuju Utara, ia mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pemberian sertifikasi tanah namun ternyata tanah itu termasuk dalam kawasan hutan lindung.

"Dalam kasus ini, sinkronisasi untuk pencetakan sawah dengan masalah RTRW harus menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan," pungkasnya. ■

(dep/so). Foto: ijayadi/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto saat menghadiri Pelantikan Ketua BPK RI Dr. Moerhadi dan Prof. Dr. Bahrullah Akbar sebagai Wakil Ketua BPK RI di Gedung MA Rabu (26/04). Foto: Jaka Nugraha



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon mengunjungi korban gusuran warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (25/04). Foto: Jayadi.



Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI saat memilih lima calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/04). Foto: Runi